

Analisis Kebijakan Luar Negeri Qatar dalam Negosiasi Taliban-Amerika Serikat (2018-2019)

Amirah Zhahirah

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
e-mail : amirah20002@mail.unpad.ac.id

Abstract

On August 15, 2021, the United States and its allies withdrew from Afghanistan, followed by the return of the Taliban to power. The withdrawal was part of the Doha Agreement, which was the result of US-Taliban negotiations with Qatar as a mediator. This study aims to analyze Qatar's foreign policy and explain the goals, objectives, options, consequences, and choices behind Qatar's decision to mediate the US-Taliban negotiations. This study uses a qualitative research method. The results of this study indicate that the goals and objectives of Qatar's foreign policy are to secure itself from threats from the Gulf countries and to strengthen its political existence. This decision was taken after considering the options and their consequences. The first option is to sever ties with the Taliban with the consequence that the Taliban will not agree to negotiate with the United States. The second option is to become a mediator for the US-Taliban with the consequence that Qatar increases its regional presence while receiving protection from the United States from its neighboring countries.

Keywords: Foreign Policy Analysis, Rational Actor Model, Taliban, United States, Qatar

Abstrak

Pada tanggal 15 Agustus 2021, tentara Amerika Serikat dan sekutunya menarik diri dari Afghanistan, disusul dengan kembali berkuasanya Taliban. Penarikan tersebut merupakan bagian dari Perjanjian Doha yang merupakan hasil perundingan AS-Taliban dengan Qatar sebagai mediator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Qatar dan menjelaskan *goals, objectives, options, consequences*, dan *choices* di balik keputusan Qatar untuk menengahi perundingan AS-Taliban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *goals* and *objectives* dari kebijakan luar

negeri Qatar adalah mengamankan diri dari ancaman negara-negara Teluk dan memperkuat eksistensi politiknya. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan *options* berikut *consequences*-nya. *Options* yang pertama, yaitu memutuskan hubungan dengan Taliban dengan *consequences* Taliban tidak akan menyetujui untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Sementara *options* yang kedua adalah menjadi mediator untuk AS-Taliban dengan *consequences* Qatar meningkatkan presensi regionalnya sekaligus mendapat perlindungan Amerika Serikat dari negara tetangganya.

Kata kunci: Amerika Serikat, Analisis Kebijakan Luar Negeri, Model Aktor Rasional, Taliban, Qatar

Pendahuluan

Pada tanggal 15 Agustus tahun 2021, dunia digemparkan dengan berita bahwa Taliban kembali menguasai Afghanistan. Hal tersebut ditandai dengan runtuhnya lembaga kepresidenan dan Tentara Nasional Afghanistan (Boni, 2022). Dalam sejarahnya, Taliban pertama kali memiliki kontrol terhadap Afghanistan pada tahun 1996 dengan mendirikan Pemerintahan Islam yang bergaya primordial (Hussain, 2022). Akan tetapi, kekuasaan Taliban tersebut tidak diakui oleh negara-negara Barat dan hampir seluruh negara di dunia. Hanya ada beberapa negara yang mengakui kekuasaan Taliban, yaitu Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi (Hussain, 2022). Kejayaan Taliban di Afghanistan pun sempat meredup karena adanya penyerangan yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat pada tahun 2001. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama *Global War on Terror*. Faktor penyebab dari invasi tersebut adalah Taliban yang menolak untuk menyerahkan pemimpin Al Qaeda, yaitu Osama Bin Laden yang dituduh sebagai pihak yang melakukan pengeboman gedung World Trade Center pada 11 September 2001 (Mu'min, Yulianti, & Sulaeman, 2021).

Pada saat itu, banyak anggota Taliban yang melarikan diri ke Pakistan. Di sana, mereka melakukan perombakan ulang terhadap struktur organisasinya. Di sisi lain, Afghanistan yang berada di bawah pimpinan Hamid Karzai mendirikan konstitusi formal pertamanya, yaitu Republik Islam Afghanistan. Konstitusi tersebut berperan sebagai pemerintahan Afghanistan (Tiwary, 2016). Pada tahun 2004, Taliban kembali ke Afghanistan dengan membawa pemberontakan yang ditujukan untuk membebaskan Afghanistan dari Amerika Serikat serta pemerintahan Afghanistan yang disebut sebagai rezim boneka milik Amerika Serikat (Gall, 2004). Sikap masyarakat Afghanistan yang lebih mempercayai figur lokal dan pemerintah Afghanistan yang tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat Afghanistan pun membuat kekuasaan Taliban di Afghanistan

kian menyebar luas. Sejak saat itu, jumlah wilayah di Afganistan yang berhasil dikuasai oleh Taliban menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Afganistan sendiri (Eland, 2017).

Keberhasilan Taliban dalam mempertahankan eksistensinya di Afganistan menandakan kemenangan Taliban di dalam *Global War on Terror* (Eland, 2017). Di sisi lain, Amerika Serikat menyadari bahwa sudah tidak ada kemenangan militer baginya (Hodali, 2021; Milman, 2021). Amerika Serikat pun membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk melakukan negosiasi dengan Taliban (Hodali, 2021). Qatar pun muncul sebagai mediator di dalam negosiasi tersebut. Tindakan mediasi sendiri telah menjadi fokus di dalam kebijakan luar negeri Qatar (Zweiri & Al Qawasmi 2021). Dengan fokus tersebut, Qatar telah menjadi mediator bagi berbagai konflik di Timur Tengah, seperti Sudan, Yaman, Lebanon, dan Palestina (Kawari, 2011; Kamrava, 2011; Zweiri & Al Qawasmi, 2021).

Resolusi konflik dari *Global War on Terror* merupakan salah satu contoh dari banyaknya negosiasi yang dimediasi Qatar. Negosiasi tersebut membahas mengenai empat isu utama, yaitu Taliban memberikan jaminan bahwa mereka Afganistan tidak akan digunakan sebagai markas bagi kelompok bersenjata asing dan para pejuang untuk melakukan serangan di luar negeri; penarikan seluruh pasukan Amerika Serikat dan NATO; dialog intra-Afganistan; dan gencatan senjata permanen (Qazi, 2019). Mayoritas dari rangkaian negosiasi tersebut dilakukan di kantor politik Taliban di Doha, ibu kota Qatar. Setelah melalui rangkaian negosiasi tersebut, kedua belah pihak mencapai kesepakatan dengan dibuatnya Perjanjian Doha yang merupakan *peace agreement* antara Amerika Serikat dan Taliban. Perjanjian tersebut dilaksanakan pada 29 Februari tahun 2020 di Sheraton Hotel Doha (Qazi, 2020).

Tindakan Qatar yang kerap kali menunjukkan presensinya sebagai mediator di dalam negosiasi yang terjadi di antara Taliban dan Amerika Serikat pun membangkitkan rasa ingin tahu peneliti terkait motivasi Qatar di balik tindakannya tersebut. Untuk dapat menjawab rasa keingintahuan tersebut, peneliti merujuk kepada berbagai penelitian terdahulu yang dibagi ke dalam tiga tipologi, yaitu kebijakan luar negeri Qatar terhadap Amerika Serikat, hubungan antara Qatar dengan Taliban, dan peran Qatar sebagai mediator di dalam negosiasi.

Tipologi yang pertama adalah kebijakan luar negeri Qatar terhadap Amerika Serikat. Dalam tipologi ini, melalui penelitian terdahulu dari Al Sulaiti (2024), Milman (2021), dan Steinberg (2023) menunjukkan bahwa Qatar memiliki kebijakan luar negeri terhadap Amerika Serikat yang berfokus pada kerja sama militer untuk menambah *power* yang dimiliki Qatar dalam melindungi minyak bumi yang dimilikinya serta

eksistensinya di dalam dinamika politik di Timur Tengah. Kebijakan luar negeri Qatar dalam menjaga stabilitas regional di Timur Tengah juga tercermin dalam tipologi selanjutnya, yaitu peran Qatar sebagai mediator. Melalui berbagai penelitian sebelumnya dari Katzman (2022), Naier (2021), dan Zweiri & Al Qawasmi (2021) menunjukkan bahwa sejak tahun 2000-an, Qatar secara aktif menjalankan perannya sebagai mediator di dalam berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah. Sementara itu, untuk tipologi yang ketiga, yaitu hubungan antara Qatar dengan Taliban, peneliti merujuk kepada penelitian dari Akkad (2021), Balasubramanian (2022), dan Kusumawijaya & Machmudi (2022), Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dinamika hubungan yang terjalin di antara Qatar dan Taliban yang erat kaitannya dengan hubungan ekonomi dan politik.

Berdasarkan rangkaian penelitian tersebut, penjelasan untuk dapat mengetahui kepentingan serta pertimbangan apa saja yang dimiliki oleh Qatar di balik diputuskannya kebijakan luar negeri Qatar sebagai mediator antara Taliban dan Amerika Serikat terkait *Global War on Terror* masih terpisah-pisah ke dalam berbagai penelitian yang berbeda, sehingga belum ada suatu penelitian yang memuat penjelasan terkait hal tersebut di dalam satu tulisan. Penelitian ini pun menawarkan nilai kebaruan, yaitu penjelasan yang komprehensif dan terintegrasi mengenai proses yang memuat kepentingan serta pertimbangan dibalik ditetapkannya kebijakan luar negeri Qatar sebagai mediator antara Taliban dan Amerika Serikat terkait *Global War on Terror*. Didukung dengan penggunaan teori Model Aktor Rasional oleh Allison, penelitian ini menawarkan penjelasan mendalam terkait *goals and objectives* yang dimiliki oleh Qatar, *options* berikut *consequences* yang menjadi pertimbangan Qatar dalam mengambil keputusan, serta *choice* yang menjelaskan kebijakan luar negeri Qatar sebagai keputusan rasional yang dipilih oleh Qatar.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami perilaku manusia di dunia nyata. Tidak hanya perilaku seseorang, penelitian jenis ini juga dapat membantu dalam mempelajari pemikiran seseorang di dalam berbagai kondisi (Yin, 2016). Peneliti menggunakan metode penelitian sosial kualitatif untuk mempelajari mengenai perilaku Qatar sebagai mediator di dalam negosiasi antara Amerika dan Taliban. Peneliti juga menggunakan metode *collecting and examining* yang merupakan proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui berbagai sumber, seperti arsip perpustakaan, jurnal, dan websites. Kumpulan informasi tersebut berperan sebagai data yang digunakan di dalam penelitian ini (Yin, 2016). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui artikel jurnal, buku, situs internet, atau

sumber lainnya mengenai objek penelitian yang didapatkan secara tidak langsung (Sari & Zefri, 2019, : 309-316).

Pemaparan dalam artikel ini akan dibagi dalam beberapa sub judul, yaitu penjelasan teori Analisis Kebijakan Luar Negeri, Model Aktor Rasional, Negosiasi dan Mediasi, Peran Qatar dalam Negosiasi Taliban dan Amerika Serikat, Tujuan Kebijakan Luar Negeri Qatar terkait Negosiasi Amerika Serikat-Taliban (*Goals and Objectives*), Pilihan di Dalam Kebijakan Luar Negeri Qatar terkait Negosiasi Amerika Serikat-Taliban (*Options*), Konsekuensi dari Kebijakan Luar Negeri Qatar terkait Negosiasi Amerika Serikat-Taliban (*Consequences*), Keputusan dari Kebijakan Luar Negeri Qatar terkait Negosiasi Taliban- Amerika Serikat (*Choice*), dan Simpulan.

Analisis Kebijakan Luar Negeri

Analisis kebijakan luar negeri adalah studi yang mempelajari perilaku serta praktik dari hubungan yang terjalin diantara aktor-aktor yang berbeda, khususnya negara, di dalam sistem internasional. Secara lebih lanjut, studi Analisis Kebijakan Luar Negeri juga mempelajari mengenai pentingnya pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri, peran aktor negara dan non-negara di dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, serta pengaruh dari faktor sosial dan institusional di dalam pembentukan kebijakan luar negeri (Alden & Aran, 2017). Akademisi lainnya mendeskripsikan Analisis Kebijakan Luar Negeri sebagai studi yang mempelajari mengenai penyebab, proses, hasil, dan efek yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pembuatan kebijakan luar negeri, baik secara komparatif atau spesifik terhadap kasus tertentu (Lia & Aggestam, 2023).

Studi Analisis Kebijakan Luar Negeri juga dikenal dengan karakternya yang menitikberatkan terhadap aktor (Alden & Aran, 2017). Hal tersebut melingkupi perilaku dan hubungan yang terjalin di antara berbagai aktor, terutama negara, di tingkat internasional. Perilaku aktor memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses pembuatan kebijakan luar negeri. Hal tersebut didukung oleh dasar argumentasi yang dimiliki oleh analisis kebijakan luar negeri, yaitu keputusan yang dibuat oleh suatu aktor merupakan dasar dari setiap hal yang terjadi di dalam Hubungan Internasional (Hudson, 2005). Oleh karena itu, studi Analisis Kebijakan Luar Negeri dapat digunakan untuk mengkaji *power politics* yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri (Wivel, 2017).

Model Aktor Rasional

Allison (1969), berargumentasi bahwa untuk menjelaskan suatu kejadian di dalam kebijakan luar negeri berarti menjelaskan bagaimana pemerintah bertindak secara rasional dalam memilih kebijakan tersebut. Hal tersebut dapat dikaji melalui model analisis kebijakan luar negeri yang dicetuskan oleh Allison di dalam bukunya, yaitu Model Aktor Rasional (Kafle, 2011). Model ini merupakan model konseptual yang digunakan para peneliti untuk memahami suatu kejadian sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu oleh pemerintah nasional sebagai suatu kesatuan. Inti dari penjelasan di dalam model ini adalah untuk menunjukkan bagaimana suatu negara atau pemerintah dapat memilih tindakan dari permasalahan strategis yang dihadapinya (Allison, 1969).

Model ini menjelaskan bagaimana suatu aktor memilih keputusan yang paling menguntungkan dengan mempertimbangkan berbagai *options* beserta ancaman dan keuntungan yang dimilikinya serta kemampuan aktor dalam menangani risiko yang terdapat di dalam keputusan yang dipilih dari *options* yang ada. Dalam model ini, Allison memiliki dasar argumentasi bahwa manusia bertindak secara rasional dengan konsep kebijakan tertentu. Kebijakan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perwujudan dari objektif yang dimiliki oleh suatu aktor (Kafle, 2011).

Model ini memiliki beberapa karakteristik yang ditarik dari kesamaan literatur mengenai Kebijakan Luar Negeri dan Hubungan Internasional dalam menghasilkan penjelasan, yang diartikan sebagai upaya untuk menunjukkan tujuan dari apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam melakukan suatu tindakan dan bagaimana tindakan tersebut merupakan pilihan yang rasional untuk tujuan negara. Karakteristik yang pertama adalah suatu tindakan, yaitu realisasi suatu tujuan atau niat. Karakteristik yang kedua bahwa aktor adalah pemerintah nasional. Karakteristik ketiga mengasumsikan bahwa tindakan tersebut dipilih sebagai tindakan yang dianggap sebagai respons terhadap permasalahan strategis (Allison, 1969).

Model ini melihat pemerintah sebagai aktor yang dapat melakukan negosiasi di dalam sistem internasional yang bersifat anarkis (Mintz & DeRouen Jr, 2018 : 57-67). Melalui model ini, Allison berupaya untuk menjelaskan hasil kolektif yang berupa tindakan negara (Avenäs, 2016). Dalam model ini, pemerintah menjadi aktor rasional dengan kemampuannya di dalam menciptakan keputusan (Kafle, 2011). Sementara itu, rasional yang dimaksud di dalam model ini adalah preferensi yang dimiliki oleh aktor dalam membuat suatu kebijakan (Mintz & DeRouen Jr, 2018 : 57-67). Rasional yang dimaksud juga dapat diartikan sebagai tindakan konsisten dari aktor yang dapat menjelaskan power yang dimiliki oleh aktor tersebut (Kafle, 2011). Melalui penjelasan

tersebut, dapat disimpulkan bahwa Model Aktor Rasional menjelaskan keputusan yang dibuat secara terpusat oleh negara yang memiliki kemampuan memilih yang dapat mendatangkan keuntungan lebih banyak bagi negara.

Model ini juga memiliki empat konsep utama, yaitu *goals and objectives*, *options*, *consequences* dan *choice*. Dalam penjelasannya mengenai *goals and objectives*, Allison (1969) berargumentasi bahwa keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan landasan utama dalam menyusun tujuan strategis. Konsep ini lebih lanjut dapat diartikan sebagai kepentingan dan nilai dari aktor yang dapat digunakan untuk mengurutkan *options* serta *consequences* dari kepentingan tersebut (Kafle, 2011). Konsep yang kedua adalah *options* yang merupakan berbagai tindakan yang relevan dengan suatu masalah strategis, yang mana tindakan-tindakan tersebut dapat memberikan gambaran dari berbagai pilihan (Allison, 1969, pp. 689-718). Dalam perkembangannya, konsep ini juga dapat dilihat sebagai pilihan yang harus dipilih oleh aktor di dalam situasi tertentu (Kafle, 2011).

Selanjutnya, *consequences* sebagai konsep yang ketiga. Allison (1969) menjelaskan *consequences* konsekuensi yang akan terjadi dari setiap *options* yang dipilih (Kafle, 2011). Oleh karena itu, setiap *options* tersebut akan terikat dengan *consequences* yang juga memiliki dampaknya masing-masing (Avenäs, 2016). Konsep yang keempat adalah *choice* sebagai tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam memilih (*choosing*) keputusan yang rasional, yaitu yang memiliki nilai paling tinggi. Dalam konteks ini, nilai paling tinggi yang memiliki kemampuan mendatangkan keuntungan paling tinggi untuk aktor. Melalui konsep ini, preferensi yang dimiliki oleh aktor juga memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan (Avenäs, 2016).

Negosiasi dan Mediasi

Untuk dapat menghasilkan penjelasan yang lebih mendalam, penelitian ini juga menggunakan konsep lainnya, yaitu negosiasi dan mediasi. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) BAB VI bagian Penyelesaian Sengketa Pasifik, Pasal 33 terkait Kewajiban Para Pihak yang Bersengketa, dinyatakan bahwa setiap konflik yang dapat memberikan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, maka terlebih dahulu harus diselesaikan secara damai. Di dalam pasal tersebut, negara diharuskan menggunakan "*Negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, menggunakan badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya sesuai pilihan mereka sendiri untuk menyelesaikan perselisihan internasional.*" Jika metode tersebut gagal, negara-negara tersebut didesak untuk menyerahkan permasalahannya kepada Dewan Keamanan PBB (Ola, 2021 : 84 95). Proses negosiasi

penting untuk membatasi konflik. Selama menghadapi konflik, strategi pertama yang dapat digunakan adalah negosiasi. Di Timur Tengah, proses perdamaian berlangsung di bawah kedua belah pihak yang mendapatkan pengalaman dalam melakukan negosiasi antara satu sama lain dan penyelesaian konflik melalui lokakarya pemecahan masalah. Negosiasi sendiri merupakan perbincangan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan (Wani, 2011 : 104-111).

Fulberg dan Taylor (1984) menunjukkan mediasi sebagai proses para partisipan berkumpul kemudian dengan bantuan satu atau beberapa orang yang bersifat netral, secara sistematis mengisolasi isu-isu yang dipermasalahkan untuk mengembangkan berbagai pilihan, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan mencapai penyelesaian yang disepakati dan dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Di dalam proses mediasi, terdapat istilah mediator, yaitu individu, negara, atau organisasi internasional, yang memiliki peran sebagai pihak ketiga yang bersifat netral. Mediator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik dalam rangka membantu para pihak tersebut untuk mencapai suatu kesepakatan (Ola, 2021 : 84-95).

Peran Qatar dalam Negosiasi Taliban dan Amerika Serikat

Dalam proses resolusi konflik antara Taliban dan Amerika Serikat terkait *Global War on Terror*, Qatar berpartisipasi melalui perannya yang tidak terbatas hanya ketika negosiasi tersebut berlangsung, akan tetapi juga setelah negosiasi tersebut mencapai suatu kesepakatan, yaitu Perjanjian Doha. Beberapa peran krusial yang dimiliki oleh Qatar, yaitu:

1. Mediator.

Qatar terus melanjutkan komitmennya sebagai mitra internasional yang setia kepada Afganistan, dan membangun mediasi yang tidak memihak dan hubungan internasional yang efektif untuk meningkatkan konsensus internasional mengenai Afganistan dan menjamin kepentingan rakyatnya (Ministry of Foreign Affairs, 2022). Qatar memiliki kemampuan untuk melakukan dialog dengan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik karena hubungan baik dengan seluruh pihak yang dimilikinya (Al Araby, 2021). Peran Qatar sebagai mediator sangat signifikan, melihat fakta bahwa Qatar juga menjadi mediator untuk peristiwa bersejarah yang terjadi antara Taliban dan Amerika Serikat. Dalam rangkaian negosiasi antara Amerika Serikat dan Taliban, Qatar menjadi mediator untuk Taliban dan Amerika Serikat sebanyak 2 kali pada tahun 2018. Dalam negosiasi yang dilaksanakan pada 28 Juli 2018, kedua pihak membahas mengenai langkah menuju perdamaian (Shah & Nordland, 2018). Pada negosiasi yang

dilaksanakan pada 13 Oktober 2018, Taliban mengajukan penghapusan pemimpin Taliban dari daftar sanksi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan penarikan tentara Amerika Serikat dari Afghanistan. Kedua belah pihak pun kembali melakukan negosiasi pada tahun selanjutnya, yang kembali dimediasi oleh Qatar. Pada negosiasi yang dilaksanakan dari 21 hingga 28 Januari 2019 tersebut, dibahas mengenai kerangka perjanjian damai perdamaian antara kedua belah pihak (Mashal, 2019).

Masih di tahun yang sama, Qatar kembali menjadi mediator di dalam negosiasi yang dilakukan di bulan Agustus. Beberapa poin penting dari negosiasi tersebut adalah pembebasan tahanan Taliban, penarikan tentara Amerika Serikat, dan komitmen Taliban dengan pemerintah Afghanistan untuk melakukan gencatan senjata (Shams & Doha, 2019). Qatar pun melakukan negosiasi lanjutan yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2019 yang menghasilkan kesepakatan berupa gencatan senjata selama tujuh hari yang dimulai dari 22 Februari 2020 hingga 29 Februari 2020 (Amin, Awan, & Naseem, 2021).

Rangkaian negosiasi tersebut pun membuahkan hasil, yaitu ditandatanganinya Perjanjian Doha pada Februari 2020. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian perdamaian antara Taliban dengan Amerika Serikat (Hussain, 2022). Di dalam perjanjian tersebut, Amerika Serikat yang diwakilkan oleh Zalmay Khalilzad, menyepakati bahwa dalam 135 hari, Amerika Serikat akan mengurangi jumlah tentaranya dari 12.000 menjadi 8.600 tentara. Amerika Serikat juga berkomitmen akan menarik penuh tentara NATO pada bulan Mei tahun 2021 dengan catatan jika Taliban memenuhi komitmen yang dinyatakannya (Gregory, 2021). Selain itu, Amerika Serikat juga akan melepaskan 500 tahanan Taliban dengan 1000 tahanan pemerintah Afghanistan sebagai gantinya. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga menjamin tidak akan melanggar kedaulatan Afghanistan (Hussain, 2022). Di sisi lain, Taliban yang diwakilkan oleh Mullah Abdul Ghani Baradar menyepakati bahwa Afghanistan tidak akan digunakan oleh anggotanya maupun anggota kelompok teroris lainnya untuk mengancam keamanan Amerika Serikat (Gregory, 2021). Selain itu, Taliban juga berkomitmen untuk mengikuti negosiasi internal dengan pemerintah Afghanistan untuk berdiskusi mengenai negara tersebut. Selain itu, sanksi yang dikenakan terhadap Taliban oleh United Nations juga akan diberhentikan (Hussain, 2022). Perjanjian Doha memiliki peranan penting dikarenakan di dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan gencatan senjata terhadap perang di Afghanistan yang sudah dilakukan selama 18 tahun (Gregory, 2021).

Tidak berhenti sampai di situ, peran Qatar sebagai mediator pun masih berlanjut pasca disepakatinya perjanjian tersebut. Amerika Serikat yang diwakilkan oleh Thomas West dan Taliban yang diwakilkan oleh Juru Bicara Menteri Luar Negeri, Abdul Qahar Balqhi, mengadakan negosiasi lainnya pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Dalam

pertemuan tersebut juga disepakati bahwa dana Bank Sentral Afganistan sebesar 7 Juta yang mengendap di Amerika Serikat untuk sebagian digunakan untuk mengatasi isu kelaparan di Afganistan yang merupakan salah satu dampak dari terjadinya *Global War on Terror*. Sementara itu, sebagian lainnya akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan terorisme antara Taliban dengan pengadilan Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Taliban juga mengutarakan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang tidak menggunakan wilayah Afganistan untuk melakukan kerusakan terhadap negara lain (Gul, 2019).

2. Bantuan kemanusiaan dan infrastruktur.

Badan-badan internasional PBB meminta bantuan dan dukungan dari Qatar untuk menyalurkan bantuan ke Afganistan. Pada tahun 2022, Menteri Luar Negeri Qatar mengumumkan janji tambahan dari Negara Qatar sebesar 25 juta USD untuk mendukung respons terhadap kemanusiaan di Afganistan. (Ministry of Foreign Affairs, 2022). Untuk dapat menerima bantuan tersebut, diperlukan akses untuk masuk ke Afganistan. Taliban pun meminta bantuan Qatar untuk memberikan bantuan teknis di bandara internasional Kabul setelah penarikan tentara Amerika Serikat (Al Jazeera, 2021). Turki dan Qatar telah menyetujui untuk membantu Taliban dalam mengoperasikan Bandara Internasional Hamid Karzai, yang rusak saat evakuasi Amerika Serikat dan NATO berlangsung, sehingga masih tidak beroperasi untuk pesawat komersial dan militer (Regencia, Pietromarchi, & Sidd, 2021). Pada tahun 2021, Qatar bekerja sama dengan pemerintah setempat sehingga bandara tersebut pun berhasil dibuka kembali untuk menerima bantuan dan melakukan penerbangan (Regencia, Gadzo, & Uras, 2021).

3. Evakuasi

Setelah Taliban mengambil alih Kabul pada 15 Agustus, Amerika Serikat meminta bantuan Qatar untuk membantunya dalam proses evakuasi puluhan ribu orang. Pada akhirnya, hampir 40 persen dari seluruh pengungsi berhasil dipindahkan melalui Qatar. Tidak hanya Amerika Serikat, media internasional juga meminta bantuan Qatar untuk mengevakuasi staf mereka. Dilaporkan bahwa tidak kurang dari 113.500 orang telah dievakuasi dari Afganistan sejak 14 Agustus 2021. Qatar mengatakan bahwa sebanyak lebih dari 43.000 orang telah transit melalui negara tersebut (Al Jazeera, 2021). Untuk beberapa upaya penyelamatan yang termasuk paling sensitif di Afganistan, Qatar melakukan operasi tersebut dengan menggunakan bantuan beberapa ratus tentara dan pesawat militer miliknya. Dilaporkan bahwa Qatar mengevakuasi sebuah sekolah

asrama putri, jurnalis yang bekerja untuk media internasional, dan tim robotika perempuan (Al Jazeera, 2021).

Qatar merupakan pusat dari setiap respons yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap keruntuhan Afghanistan (Lederman & Sanchez, 2021). Diplomat Qatar yang berbasis di Kabul telah berhasil mengevakuasi sebanyak 75.000 warga Amerika Serikat, Afghanistan, serta negara lainnya dari Kabul. Sejak berakhirnya penarikan Amerika Serikat pada 30 Agustus 2021, beberapa penerbangan sewaan maskapai Qatar telah berhasil mengevakuasi tambahan warga Amerika Serikat dan warga negara lainnya (Katzman, 2022). Dengan ditutupnya Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul, misi diplomatik Amerika Serikat yang baru untuk Afghanistan Seluruhnya berbasis di Doha (Lederman & Sanchez, 2021). Tidak hanya Amerika Serikat, negara lain seperti Inggris, Jepang, dan Belanda juga ikut untuk sementara memindahkan kedutaan untuk Afghanistan ke Doha (Al Sulaiti, 2024). Peran Qatar dalam evakuasi mencerminkan posisinya sebagai tuan rumah pangkalan militer milik Amerika Serikat terbesar yang berlokasi di Timur Tengah dan keputusannya bertahun-tahun yang lalu untuk menampung kepemimpinan politik Taliban di kantor Taliban di Doha yang dibuka pada tahun 2013 (Al Jazeera, 2021).

Tujuan Kebijakan Luar Negeri Qatar terkait Negosiasi Amerika Serikat-Taliban (*Goals and Objectives*)

Berdasarkan teori Analisis Kebijakan Luar Negeri yang dikemukakan oleh Allison (1969), *objectives* yang dimaksud merupakan keamanan negara dan kepentingan negara. Hal tersebut selaras dengan tujuan utama kebijakan luar negeri Qatar, yaitu untuk menemukan solusi yang berkelanjutan terkait perselisihan dan memelihara perdamaian dan keamanan regional dan internasional (Zweiri & Al Qawasmi 2021). Masalah keamanan sendiri merupakan alasan yang paling penting bagi kebijakan luar negeri Qatar yang kontroversial (Milman, 2021). Steinberg, *Senior Associate di Institute for International and Security Affairs*, menyatakan bahwa tidak diragukan lagi, memperkuat eksistensi merupakan motif yang paling penting di balik kebijakan luar negeri Qatar (Hodali, 2021). Lebih lanjut, Steinberg menyatakan "*Beberapa negara tetangga, seperti Arab Saudi, tidak berpikir bahwa Qatar benar-benar perlu ada*" (Hodali, 2021; Milman, 2021). Qatar sendiri mendapatkan tamparan keras setelah diberlakukannya blokade oleh negara-negara Teluk terhadapnya. Dave Des Roches, yang merupakan mantan pejabat Departemen Pertahanan dan pejabat White House sekaligus seorang profesor di National Defence University, menyatakan bahwa blokade tersebut merupakan *wake-up call* dan peristiwa transformatif (untuk Qatar) (Akkad, 2021).

Steinberg berargumentasi bahwa Kepentingan Qatar adalah untuk bertindak sebagai mediator dan untuk menunjukkan eksistensinya di dalam peta politik regional dan juga politik dunia. Dengan cara ini, Qatar dapat menyalurkan kepentingannya pada negara-negara Barat, bahkan mungkin terhadap China dan Rusia (Hodali, 2021). Hal tersebut dilakukan Qatar untuk dapat terus bertahan sebagai negara yang independen. Lebih dari sekedar ketidakberpihakan, Qatar tampaknya tertarik untuk menjadi rekan pilihan negara-negara Barat di kawasan untuk melindungi diri dari kekuatan negara-negara tetangganya (Milman, 2021). Qatar ingin membentuk dirinya sebagai *power* baru yang bergantung pada jenis *power* yang baru. Karena kurangnya *power* yang dimiliki oleh Qatar, maka Qatar pun bergantung pada perannya di dalam tindakan mediasi yang dijalankannya (Steinberg, 2023). Mediasi merupakan hal yang digunakan Qatar untuk mendorong kepentingan serta pengaruhnya (Kamrava, 2011). Dengan demikian, Qatar bermaksud untuk menunjukkan kepada Amerika Serikat dan negara Barat lainnya bahwa hal tersebut dapat berkontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di Timur Tengah dan sekitarnya (Steinberg, 2023).

Pilihan di Dalam Kebijakan Luar Negeri Qatar terkait Negosiasi Amerika Serikat-Taliban (*Options*)

A. Memutuskan Hubungan dengan Taliban.

Pilihan ini didasarkan pada tuntutan yang diajukan oleh negara Teluk dalam blokade yang dilakukannya terhadap Qatar. Dalam tuntutannya, negara-negara Teluk menuntut Qatar untuk memutuskan semua hubungan dengan “organisasi teroris” dan menyerahkan “tokoh teroris”. Qatar juga diminta untuk menghentikan semua pendanaan untuk individu atau organisasi yang ditetapkan sebagai teroris oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Amerika Serikat, dan negara lainnya (BBC, 2017; Al Jazeera, 2017; Gulf News, 2017). Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain menuduh Qatar membiayai terorisme dengan memberikan contoh pembukaan kantor Taliban di Doha (Al Jazeera, 2017). Taliban juga merupakan salah satu organisasi yang ditetapkan sebagai teroris oleh Amerika Serikat. Perwakilan *White House National Security Council*, Caitlin Hayden, menyatakan bahwa Taliban telah ditambahkan ke daftar Specially Designated Global Terrorists (SDGT) oleh pemerintah eksekutif pada bulan Juli tahun 2002 (ABC News, 2014). Di sisi lain, kedekatan Qatar dengan Taliban merupakan hal yang penting bagi hubungan Qatar dengan Amerika Serikat. Qatar memegang kartu terhadap Amerika Serikat, yaitu perannya sebagai penghubung Amerika Serikat ke Taliban (Akkad, 2021). Qatar juga memanfaatkan *soft power*-nya terhadap kelompok Islamis untuk membantu kebijakan luar negeri regional Amerika

Serikat terkait negosiasi dengan Hamas dan dengan Taliban, yang diperlukan untuk menghentikan konflik yang suram dan panjang bagi Amerika Serikat (Roberts, 2019).

Selain itu, berdasarkan argumentasi Kristian Coates Urichsen, pakar Timur Tengah di Institut Kebijakan Publik Baker Universitas Rice, Qatar juga menjadi tempat dimana Amerika Serikat menempatkan para pemimpin Taliban untuk dihubungi. Tidak hanya itu, meskipun Taliban pernah menipu Amerika Serikat dengan mengirimkan 'pemimpin palsu', Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani menyatakan bahwa Taliban tidak berada di dalam posisi untuk menipu Qatar (Akkad, 2021). Fakta-fakta tersebut menunjukkan peran penting yang dimiliki Taliban terhadap pengaruh Qatar dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Maka, hal tersebut pun menjadi dasar dari pilihan lainnya yang dimiliki oleh Qatar.

B. Menjadi Mediator untuk Taliban dan Amerika Serikat.

Hubungan Qatar dengan Amerika Serikat memiliki pengaruh yang besar di dalam pilihan ini. Dalam kasus yang melibatkan Afganistan, Amerika Serikat membutuhkan adanya keterlibatan dari pihak ketiga yang menjadi penengah antara Amerika Serikat dan pihak lain (Taliban). Sejak Amerika Serikat menyadari kemungkinan bahwa tidak adanya kemenangan militer di Afganistan, Amerika Serikat pun berusaha mencari tempat yang netral untuk melakukan negosiasi dengan Taliban (Hodali, 2021).

Pada tahun 2013, atas permintaan Amerika Serikat, Qatar mengizinkan Taliban untuk membuka kantor di ibu kotanya, Doha. Hal tersebut menjadikan Doha sebagai wilayah pertama yang memiliki perwakilan Amerika Serikat dan Taliban di kota yang sama. Presiden Barack Obama mendorong terjadinya hal tersebut dengan maksud untuk melakukan perundingan terkait penarikan pasukan dari Afganistan dengan milisi Islam. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa setidaknya sejak tahun tersebut dan seterusnya, sudah jelas bahwa tidak akan pernah ada kemenangan militer bagi Washington (Milman, 2021). Argumentasi tersebut diperkuat dengan pernyataan Elham Fakhro, pakar negara-negara Teluk di *International Crisis Group* yang menyatakan "*Saya rasa gagasan di balik Doha menginisiasi perundingan dengan Taliban adalah pengakuan bahwa mungkin tidak akan pernah ada kemenangan militer langsung di Afganistan, dan bahwa -[jika] kemenangan tersebut tidak ada- mungkin perlu untuk membawa mereka sebagai bagian dari solusi politik*" (Hodali, 2021).

Dari perspektif Qatar, perannya sebagai perantara dan tuan rumah bagi Taliban, menjadi semakin penting setelah negara tersebut mengalami blokade oleh rival regionalnya pada bulan Juni 2017. Pada saat itu, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain,

dan Mesir memutuskan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan Qatar. Tidak hanya itu, negara-negara tersebut juga menolak akses Qatar ke wilayah udara mereka sebagai hukuman atas apa yang mereka klaim sebagai dukungan yang diberikan oleh Qatar terhadap kelompok militan, hubungannya dengan Iran, serta tuduhan lainnya. Sehari setelah blokade tersebut dilakukan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan isyarat kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melalui tweet-nya bahwa kedua negara tersebut dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan. Ulrichsen pun mengatakan bahwa hal tersebut menyebabkan kepanikan di Qatar (Akkad, 2021). Qatar pun berada di dalam mode krisis yang menempatkan militernya di dalam mode siaga yang tinggi (Zweiri & Al Qawasmi 2021).

Situasi tersebut pun membuat Qatar semakin gencar dalam upayanya mempererat hubungan dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2017, Qatar menghabiskan 13 juta USD untuk melobi Amerika Serikat. Angka tersebut merupakan tiga kali lipat jumlah yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, berdasarkan pernyataan Ben Freeman, direktur Inisiatif Transparansi Pengaruh Asing di organisasi nirlaba Center for International Policy, sejak saat itu, Qatar telah mengeluarkan sebesar 10 juta USD atau lebih setiap tahunnya. Selain meningkatkan pengeluarannya untuk melobi pasca terjadinya blokade, Qatar juga meluncurkan dan membayar biaya perluasan Pangkalan Udara al-Udeid, fasilitas militer milik Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah (Akkad, 2021). Qatar juga membeli jet cepat dari Amerika Serikat (Roberts, 2019). Dilansir dari website resmi Kementerian Luar Negeri Qatar, NATO dan Qatar sendiri telah menandatangani berbagai perjanjian, seperti Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama Individu, Perjanjian Keamanan Informasi, dan perjanjian untuk menempatkan tentara dan staf NATO di Pangkalan Udara Al Udeid (NATO, 2022).

Konsekuensi dari Kebijakan Luar Negeri Qatar terkait Negosiasi Amerika Serikat-Taliban (*Consequences*)

A. Taliban tidak akan menyetujui untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat.

Jika Qatar memutuskan hubungan dengan Taliban, terdapat kemungkinan bahwa Taliban tidak akan menyetujui untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Taliban telah menegaskan secara terbuka dan privat bahwa mereka hanya akan bekerja sama dengan Qatar (Akkad, 2021). Selain itu, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed Said, memperingatkan bahwa mengisolasi Taliban dapat menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut. Said menyatakan bahwa jika Qatar memutuskan keterlibatan dengan Taliban, hal tersebut akan meninggalkan kekosongan dan tanpa adanya keterlibatan tersebut, kemajuan nyata di bidang keamanan atau sosial ekonomi

tidak akan tercapai (Kamel & Rinke, 2021). Dengan mempertimbangkan konsekuensi tersebut, pilihan Qatar untuk menyetujui tuntutan negara-negara Teluk untuk memutuskan hubungan dengan Taliban merupakan pilihan yang memiliki banyak dampak negatifnya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan konsekuensi dari pilihan lainnya sebelum menetapkan keputusan yang diambil oleh Qatar.

Tayyab Agha sebagai perwakilan Taliban mengatakan kepada para pejabat Amerika Serikat bahwa Taliban tidak akan membuka kantor di negara mana pun yang memiliki pasukan militer di Afganistan, negara tetangga, atau di negara mana pun di mana keberadaan kantor tersebut dapat menimbulkan perlawanan terhadap Taliban. Agha lebih lanjut menambahkan, *“Jika Taliban memilih Arab Saudi, maka akan menimbulkan reaksi negatif dari Iran, (sementara) Pemerintah Uni Emirat Arab dan Turki terlalu dekat dengan Pakistan, (sehingga) itu pasti Qatar”* (Akkad, 2021). Dengan dibukanya kantor politik Taliban di Qatar, hal tersebut memberikan Qatar pengaruh terhadap Taliban. Asisten Menteri Luar Negeri Qatar, Lolwa al-Khater, mengakui bahwa Qatar memperoleh kemajuan politik dalam beberapa minggu terakhir. Akan tetapi al-Khater menolak gagasan bahwa upaya yang dilakukan Qatar tersebut hanya bersifat strategis (Al Jazeera, 2021).

Dibukanya kantor politik tersebut juga menunjukkan pengaruh Amerika Serikat terhadap Qatar dan Taliban. Hal tersebut dikarenakan kantor politik Taliban tersebut dibuka atas permintaan pemerintah Amerika Serikat (Milman, 2021; Al Jazeera, 2021). Qatar yang juga dekat dengan Amerika Serikat, membantu kedua belah pihak tersebut untuk melakukan negosiasi terkait pelepasan Bowe Bergdahl dan Peter The Curtis yang disandera di Afganistan dan Suriah. Dalam negosiasi tersebut, Qatar berperan sebagai perantara antara Amerika Serikat dan Taliban dikarenakan Amerika Serikat yang tidak dapat menemui Taliban dan organisasi pemberontak Suriah secara langsung. Negosiasi tersebut pun membuahkan hasil, yaitu dirilisnya Bergdahl pada Juni tahun 2014 (Zweiri & Al Qawasmi 2021). Qatar juga secara aktif memberikan bantuan finansial terhadap Afganistan, yang mengalami kesulitan finansial akibat pembekuan aset yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Afganistan (Chaubey, 2021). Dengan segala bentuk bantuan serta investasi yang diberikan oleh Qatar terhadap Afganistan, Qatar pun memiliki pengaruh yang kuat terhadap politik Afganistan (Balasubramanian, 2022).

B. Meningkatkan presensi regional Qatar sekaligus mendapat perlindungan Amerika Serikat dari negara tetangganya.

Dengan menjadi mediator di dalam negosiasi Taliban dan Amerika Serikat terkait penyelesaian konflik di Afganistan, Qatar dapat meningkatkan presensi regionalnya

sekaligus mendapat perlindungan Amerika Serikat dari negara tetangganya. Guido Steinberg, peneliti Jerman di Afrika dan Timur Tengah, menyatakan bahwa Qatar telah menjadi mediator dalam politik regional selama hampir dua dekade karena Qatar ingin meningkatkan posisi regionalnya. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Qatar sangatlah bergantung kepada Arab Saudi, sehingga Qatar secara de facto bertindak sebagai protektorat Arab Saudi (Milman, 2021). Negara tersebut terus berupaya untuk keluar dari bawah payung Saudi (Al Sulaiti, 2024). Dalam upaya Qatar untuk dapat keluar dari situasi tersebut, Qatar mulai menerapkan strategi baru dan menjalin jaringan diplomatik serta hubungan sosial-ekonomi secara mandiri, keluar dari bayang-bayang negara tetangganya untuk dapat menjadi mediator yang independen (Milman, 2021). Qatar mengambil langkah menuju orbit keamanan Amerika Serikat, khususnya dengan seruan pembentukan pangkalan udara Amerika di Doha. Hubungan yang berkembang antara Qatar dan Amerika Serikat juga menjamin kedaulatan negara Qatar (Al Sulaiti, 2024).

Qatar mulai memetakan kebijakan luar negeri yang independen dan pragmatis dengan menjaga hubungan baik dengan para pemain yang bertentangan seperti Iran dan Amerika Serikat atau Hamas dan Israel (Al Sulaiti, 2024). Walaupun strategi diplomatik tersebut dianggap sangat berisiko, namun strategi tersebut juga dinilai sebagai salah satu strategi yang paling cerdas dan maju. Qatar terkenal sebagai mediator dalam berbagai isu regional. Qatar mampu menjaga hubungan baik dengan Iran sekaligus menjadi tuan rumah bagi tentara Amerika Serikat di wilayahnya, kemampuan Qatar dalam menyambut faksi-faksi yang bertikai di Yaman, Sudan, dan Lebanon ke hotel-hotel termewahnya untuk melakukan perundingan. Qatar memiliki sikap yang terbuka terhadap politik Islam, sehingga menarik perhatian Amerika Serikat dan sekutu militernya. Pemerintah Qatar telah mendapatkan kepercayaan di seluruh bidang dan mengambil keuntungan dari kepercayaan tersebut (Milman, 2021).

Hal yang paling penting adalah terdapat kemungkinan bahwa Qatar akan lebih aman dalam menghadapi krisis apa pun di masa depan karena kini Qatar mempunyai kredit dari para major powers. Andreas Krieg, Dosen Senior di Sekolah Studi Keamanan King's College London, yang mengamati beberapa negosiasi tersebut dari dekat selama bertahun-tahun, menambahkan, *"Jika ada krisis lain jika Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memutuskan tidak hanya untuk memblokir Qatar tetapi berpotensi melakukan operasi militer, kali ini Amerika Serikat pasti akan bertahan atau melawan, bahkan lebih luas lagi, daripada yang telah dilakukan pada tahun 2017"* (Akkad, 2021). Pada tahun tersebut, Qatar menghadapi blokade darat, laut, dan udara yang berlangsung selama tiga setengah tahun yang dilakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Yordania, Yaman, dan Libya. Negara-negara tersebut memutuskan hubungan diplomatik dan menutup jalur darat, udara, dan laut dengan melarang kapal serta pesawat Qatar

untuk menggunakan jalur udara maupun laut (Zweiri & Al Qawasmi 2021). Hal tersebut pun menyebabkan Qatar mengalami kekurangan barang-barang penting. Terlebih lagi, Qatar merupakan negara yang bergantung kepada impor. Sebanyak 90% pangan merupakan barang impor yang melalui perbatasan Arab Saudi (Álvarez-Ossorio & Garcia, 2021 : 97-120).

Keputusan dari Kebijakan Luar Negeri Qatar terkait Negosiasi Taliban- Amerika Serikat (Choice)

Pada akhirnya, Qatar sebagai mediator dalam negosiasi antara Taliban dan Amerika Serikat terkait resolusi konflik *Global War on Terror* merupakan keputusan rasional yang diambil oleh Qatar. Dalam kebijakannya, Qatar menggunakan pendekatan yang rasional untuk menyelesaikan berbagai konflik. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai tindakan mediasi dan diplomasi yang Qatar lakukan. Dengan menggunakan pendekatan yang rasional, Qatar dapat melakukan perannya sebagai mediator di kedua sisi. Di sisi oposisi, Qatar berperan untuk menetralkan lawan, sementara di sisi koalisi, Qatar memiliki peran untuk memenangkan teman. Cara tersebut membuat Qatar memiliki kemampuan untuk dapat membawa pihak yang saling bertolak belakang ke dalam suatu ruang negosiasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan Qatar dalam mempertahankan hubungan militer dan politik dengan Amerika Serikat sekaligus membuka ruang untuk berkomunikasi dengan Taliban. Pemerintah Qatar juga terus melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keseimbangan dan keterbukaan tersebut (Naier, 2021 : 43-50).

Melalui diplomasi dan mediasi, Qatar dapat menunjukkan eksistensinya dalam politik internasional. Qatar telah menjadi mediator yang memiliki sifat netral dalam intervensi yang dilakukannya terkait dengan penyelesaian perselisihan melalui berbagai upaya negosiasi. Sejak awal tahun 2000-an, Qatar telah muncul sebagai mediator netral di antara pihak-pihak yang bersengketa di banyak kawasan. Selama bertahun-tahun, Qatar telah memperoleh reputasi luas di tingkat regional dan internasional. Mediasi yang dilakukan oleh Qatar pun menarik banyak perhatian hingga menjadi perhatian global. Bersambungan dengan hal tersebut, kemampuan Doha—ibu kota Qatar dalam melakukan mediasi berbagai isu penting di tingkat regional dan internasional pun membuat Doha juga kini telah dikenal sebagai pusat utama penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah (Naier, 2021, h. 43-50).

Qatar berada di dalam situasi yang sulit di wilayah yang sering dilanda konflik besar atau beberapa konflik setiap dekadanya. Qatar yang memiliki perbatasan utama dengan hegemoni regional seperti Arab Saudi (perbatasan darat) dan Iran (perbatasan

maritim) menjadi kekhawatiran Qatar sejak lama. Sebagai solusinya, sejak awal tahun 1990-an, para pemimpin Qatar telah mengambil pendekatan dua jalur untuk mengamankan negaranya (Roberts, 2019). Pertama, Qatar telah mencari perlindungan secara implisit dari Amerika Serikat dengan menjadi tuan rumah untuk pangkalan militer Amerika Serikat. Kedua, untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan dengan Amerika Serikat, para pemimpin Qatar mencari sumber dukungan yang lebih luas dan beragam di seluruh Timur Tengah (Roberts, 2019).

Keputusan Qatar menjadi mediator juga dipengaruhi oleh ketergantungan Qatar terhadap Amerika Serikat. Keputusan tersebut merupakan perwujudan atas permintaan dari pemerintahan Amerika Serikat. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Mutlaq Al Qahtani, Perwakilan Khusus Menteri Luar Negeri Qatar bidang kontra-terorisme yang menyatakan bahwa memediasi Taliban didasarkan pada permintaan pemerintah Amerika Serikat dan merupakan bagian dari *open door policy* Qatar untuk memfasilitasi negosiasi, melakukan mediasi, dan membawa perdamaian (Al Jazeera, 2017). *Open-door policy* sendiri merupakan sebuah prinsip kebijakan yang disusun oleh seorang Emir bernama Syekh Hamad yang diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh Qatar untuk menjalin hubungan pertemanan melalui upaya mediasi konflik. Tujuan dari kebijakan luar negeri itu adalah untuk meningkatkan profil internasional Qatar dan menjalin hubungan persahabatan dengan pihak-pihak yang berkonflik (Christanti, et.al, 2022 : 181 - 191).

Setelah terjadinya blokade yang dialami Qatar pada tahun 2017, *open-door policy* pun memiliki makna lainnya, yaitu sebagai perwujudan dari upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan diversifikasi pendapatan serta memperbaiki citra yang dimiliki Qatar pasca terjadinya krisis diplomatik pada tahun 2017 (Christanti, et.al, 2022 : 181 - 191). Qatar juga menjaga hubungan baik dengan Taliban saat Taliban berkuasa Afganistan, menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Taliban ketika rezim mereka digulingkan pada tahun 2002, memberikan bantuan finansial, dan bahkan membuka kantor untuk Taliban di Doha pada bulan Juni tahun 2013 (Kusumawijaya & Machmudi, 2022). Taliban sendiri menjadikan Qatar sebagai lokasi yang dipilih karena dianggap sebagai lokasi yang netral. Taliban memandang Qatar sebagai negara yang memiliki hubungan yang seimbang dengan seluruh pihak dan mempunyai status yang bergengsi di lingkup Islam. Di sisi lain, Amerika Serikat juga senang dengan pilihan tersebut (BBC, 2013). Dengan dukungan Amerika Serikat, Qatar memutuskan untuk menjadi tuan rumah kantor perwakilan Taliban di Doha yang dapat digunakan oleh tokoh-tokoh moderat Taliban dapat terlibat dengan diplomat internasional (Katzman, 2022). Hubungan baik yang dijalin oleh Qatar dengan kedua pihak membuat rekonsiliasi konflik tersebut dapat berjalan dengan lancar (Cevy & Batubara, 2022 : 9-15).

Qatar juga meningkatkan presensi regionalnya dengan menjadi penghubung bagi pihak luar, khususnya Uni Eropa, terhadap Afganistan. Kini, Qatar mengambil kendali status dan mendapatkan keuntungan dari kebutuhan dunia untuk mengetahui, memahami, dan melibatkan diri dengan pemerintah Afganistan yang baru dibentuk. Langkah diplomatik Qatar tersebut untuk memposisikan dirinya sebagai key player di dalam perubahan baru yang terjadi di kawasan tersebut. Dengan demikian, Qatar pun mendapatkan perlindungan yang sangat dibutuhkan dari Barat, dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Teluk (Milman, 2021).

Untuk mendapatkan perlindungan tersebut, Qatar memanfaatkan kedekatannya dengan Taliban. Dalam hal ini, Qatar diuntungkan oleh kepentingan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, yaitu untuk melakukan negosiasi dengan Taliban terkait penyelesaian konflik dari *Global War on Terror* yang utamanya terkait upaya untuk mengeluarkan tentaranya dari Afganistan. Dengan Taliban yang kembali menguasai sebagian besar wilayah di Afganistan, hal tersebut menjadi pertanda kekalahan Amerika Serikat di dalam *Global War On Terror*. Oleh karena itu, Amerika Serikat pun membutuhkan adanya pihak yang dapat menghubungkannya dengan Taliban untuk lebih lanjut memfasilitasi kedua pihak tersebut dalam melakukan negosiasi terkait penyelesaian konflik dari *Global War on Terror*. Kesempatan ini lah yang menjadi peluang bagi Qatar untuk memanfaatkan kedekatannya dengan Taliban menjadi kekuatan *soft power* yang dimilikinya terhadap Amerika Serikat.

Qatar merupakan salah satu dari sedikit pihak yang memiliki hubungan dengan Taliban. Keduanya memiliki pengaruhnya terhadap satu sama lain. Melalui hubungannya dengan Qatar, Taliban dapat mewujudkan kepentingannya, yaitu dikenal sebagai suatu pemerintahan yang moderat. Sementara Qatar, dengan akses yang dimilikinya untuk menghubungkan dunia luar dengan pemimpin Taliban, hal tersebut membuat presensi politik Qatar baik di tingkat internasional meningkat karena perannya sebagai penghubung antara dunia luar dengan Taliban. Presensi politik ini penting untuk Qatar karena dapat membuat Qatar tidak lagi dikenal sebagai bawahan Arab Saudi, akan tetapi sebagai suatu kekuatan politik yang independen. Tidak hanya itu, Qatar pun mendapatkan perlindungan dari Amerika Serikat sehingga dapat mengatasi masalah keamanannya yaitu ancaman yang datang dari negara-negara Teluk. Kedua hal tersebut juga menjadi implementasi dari *open-door policy* Qatar yang terbuka bagi seluruh pihak karena sikap Qatar yang menjalin hubungan dengan baik dengan *major powers* seperti Amerika Serikat maupun pihak yang kontroversial seperti Taliban. Peran Qatar sebagai mediator antara Amerika Serikat dan Taliban dalam penyelesaian konflik Afganistan pun diargumentasikan peneliti sebagai keputusan yang paling menguntungkan bagi Qatar karena membuat Qatar dapat mencapai kepentingannya, yaitu memperkuat

keamanannya dan meningkatkan eksistensi politiknya. Oleh karena itu, keputusan tersebut pun menjadi kebijakan luar negeri yang diambil oleh Qatar.

Simpulan

Kebijakan luar negeri Qatar menjadi mediator Amerika Serikat dan Taliban merupakan suatu keputusan yang dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu tujuan atau *goals and objectives* yang dimiliki Qatar. Allison sendiri menerjemahkan *goals and objectives* sebagai keamanan nasional dan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, Qatar memiliki tujuan dari segi keamanan untuk mengamankan negaranya dari ancaman negara-negara Teluk dan kepentingannya untuk memperkuat eksistensi politiknya.

Berdasarkan *goals and objectives* tersebut, Qatar memiliki dua *options*, yaitu memutuskan hubungan dengan Taliban dan menjadi mediator untuk Amerika Serikat dan Taliban. *Options* memutuskan hubungan dengan Taliban didasarkan pada tuntutan yang diberikan oleh negara-negara Teluk di dalam blokade yang dilakukan oleh mereka terhadap Qatar yang menuntut Qatar untuk memutuskan hubungan dengan organisasi atau pihak yang dikategorikan sebagai teroris, salah satunya merupakan Taliban. Di sisi lain, Hubungan Qatar dengan Taliban merupakan sesuatu yang penting karena Qatar memiliki kartu terhadap Amerika Serikat, yaitu peran Qatar sebagai penghubung dengan Taliban. *Options* yang kedua, yaitu menjadi mediator untuk Taliban dan Amerika Serikat. Karena kekalahan yang dialaminya di dalam *Global War on Terror*, Amerika Serikat pun membutuhkan adanya pihak yang dapat menjadi mediator antara Amerika Serikat dengan Taliban untuk melakukan negosiasi terkait resolusi konflik dari *Global War on Terror*.

Di sisi lain, pasca dilanda blokade yang dilakukan oleh negara-negara Teluk, Qatar terus melakukan berbagai upaya untuk mempererat hubungannya dengan Amerika Serikat untuk memperkuat keamanannya dengan mendapatkan perlindungan dari Amerika Serikat. Masing-masing dari *options* tersebut mempunyai *consequences*. *Options* yang pertama memiliki *consequences* yaitu jika Qatar memutuskan hubungan dengan Taliban, terdapat kemungkinan bahwa Taliban tidak akan menyetujui untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Selanjutnya, konsekuensi dari *options* yang kedua, yaitu dengan menjadi mediator di dalam negosiasi Taliban dan Amerika Serikat terkait resolusi konflik di Afghanistan, Qatar dapat meningkatkan presensi regionalnya sekaligus mendapat perlindungan Amerika Serikat dari negara tetangganya melalui kredit dari major power yang didapatkannya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kebijakan luar negeri Qatar sebagai mediator antara Amerika Serikat dan Taliban di dalam negosiasi terkait resolusi konflik *Global War on Terror* pun menjadi *choice* atau keputusan rasional yang diambil oleh Qatar. Keputusan tersebut membuat Qatar dapat mendapatkan perlindungan keamanan dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Qatar pun menjadi *key player* di Afghanistan dengan berperan sebagai penghubung antara dunia luar dengan Taliban yang sekarang merupakan pihak yang menguasai Afghanistan. Melihat kedua hal tersebut, keputusan ini merupakan keputusan yang paling menguntungkan untuk Qatar, sehingga keputusan ini merupakan keputusan rasional. Melalui keputusan ini, Qatar pun dapat mencapai *goals and objectives*-nya, yaitu memperkuat eksistensi politiknya, baik di tingkat regional maupun global, serta memperkuat keamanan negaranya melalui perlindungan dari Amerika Serikat yang didapatnya.

Daftar Pustaka

- ABC News. (2014, Juni 5). White House: Yes, The Taliban Is a Terrorist Organization. [online]. Dalam: <https://abcnews.go.com/Politics/white-house-taliban-terrorist-organization/story?id=23981888> [Diakses 22 Agustus 2023].
- Akkad, D. (2021, September 13). How Qatar became the US-Taliban mediator - and what happens next. Middle East Eye, [online]. Dalam: <https://www.middleeasteye.net/news/qatar-us-taliban-how-became-mediator-talks> [Diakses 18 Oktober 2023].
- Al Araby, A. (2021). Dawr al-Wasata fi Afghanistan. Youtube [online]. Dalam: <https://www.youtube.com/watch?v=nRwAn4zVL7A> [Diakses 18 Oktober 2023].
- Alden, C., & Aran, A. (2017). Foreign Policy Analysis: New Approaches. New York: Routledge.
- Allison, G. T. (1969). Conceptual Models And The Cuban Missile Crisis. The American Political Science Review, [online] 63(3), 689-718. Dalam: doi:10.2307/1954423
- Al Jazeera. (2017). Arab states issue 13 demands to end Qatar-Gulf crisis. [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2017/7/12/arab-states-issue-13-demands-to-end-qatar-gulf-crisis> [Diakses 10 Oktober 2023].
- Al Jazeera. (2017). Qatar hosted Taliban 'at request of US government'. [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2017/6/11/qatar-hosted-taliban-at-request-of-us-government> [Diakses 18 Oktober 2023].

- Al Jazeera. (2017). Saudi Arabia and UAE 'tried to host' Taliban first. [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2017/8/12/saudi-arabia-and-uae-tried-to-host-taliban-first> [Diakses 18 Oktober 2023].
- Al Jazeera. (2018). Taliban meet US officials in United Arab Emirates. [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2018/12/17/taliban-meet-us-officials-in-united-arab-emirates> [Diakses 10 Oktober 2023].
- Al Jazeera. (2021). Qatar lauded for its role in Afghanistan evacuations. [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2021/8/30/qatar-emerges-as-key-player-in-afghanistan-after-us-pullout> [Diakses 27 September 2023].
- Al Sulaiti, H. E. (2024). Qatar Mediation Strategy: Afghanistan as A Case Study. [online]. Dalam: <https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/51105> [Diakses 27 September 2023].
- Amin, R., Awan, G. M., & Naseem, F. (2021). US-Taliban Negotiated Peace Accord: Analyzing the Future Prospects. *Research Journal of Social Sciences & Economics Review*, [online] 2(2) 164-170. Dalam: doi:<https://doi.org/10.36902/rjsser-vol2-iss2-2021> [Diakses 11 November 2023].
- Avenäs, S. (2016). Why the bear kicked the hornet's nest: Causal processes of Russian foreign policy on Syria. *Political Science* 15 ECTS.
- Balasubramanian, P. (2022). Reluctant or Pragmatic? The GCC's Policy towards Taliban-Led Afghanistan. *Journal of Asian Security and International Affairs*, [online] 1-15. Dalam: doi:[10.1177/23477970221130654](https://doi.org/10.1177/23477970221130654) [Diakses 18 Oktober 2023].
- BBC. (2013). How Qatar came to host the Taliban. [online]. Dalam: <https://www.bbc.com/news/world-asia-23007401> [Diakses 22 Oktober 2023].
- BBC. (2017). Qatar crisis: What you need to know. [online]. Dalam: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40173757> [Diakses 18 Oktober 2023].
- Cevy, A. I., & Batubara, A. (2022). Peran Qatar Sebagai Mediator Dalam Rekonsiliasi Konflik di Afghanistan Pada Tahun 2013 - 2021. *Kajian Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 9-15.
- Christanti, N. F., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2022). Dampak Open-Door Policy Terhadap Peristiwa Krisis Diplomatik. *Journal of International Relations*, 181 – 191.
- Eland, I. (2017, September 5). Afghanistan: The Only Good Strategy Is An Expiring One. [online]. Dalam: <https://www.huffpost.com/entry/afghanistan-the-only-good->

strategy-is-an-expiring_b_59af39a4e4b0c50640cd62ef?ncid=engmodushpmsg00000004 [Diakses 18 Oktober 2023].

- Gall, C. (2004, November 13). World Briefing | Asia: Afghanistan: Taliban Leader Vows Return. [online]. Dalam: <https://www.nytimes.com/2004/11/13/washington/world/world-briefing-asia-afghanistan-taliban-leader-vows-return.html> [Diakses 11 November 2023].
- Gul, A. (2019, Maret 4). Qatar Appears Upbeat About US-Taliban Talks. VOA, [online]. Dalam: <https://www.voanews.com/a/qatar-expects-us-taliban-talks-to-have-successful-outcome-very-soon-/4812426.html> [Diakses 22 Agustus 2023].
- Gulf News. (2017, Juni 23). What are the 13 demands given to Qatar? [online]. Dalam: <https://gulfnews.com/world/gulf/qatar/what-are-the-13-demands-given-to-qatar-1.2048118> [Diakses 5 September 2023].
- Hodali, D. (2021). Why Qatar fosters close contact with the Taliban. Deutsche Welle, [online]. Dalam: <https://www.dw.com/en/why-qatar-fosters-close-contact-with-the-taliban/a-59030146> [Diakses 11 November 2023].
- Hudson, V. M. (2005). Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations. *Foreign Policy Analysis*, [online] 1(1), 1-30. Dalam: <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2005.00001.x> [Diakses 5 September 2023].
- Kafle, T. R. (2011). *Making a Difference: Allison's Three Models of Foreign Policy Analysis*. Nikosia: University of Nicosia.
- Kamel, E., & Rinke, A. (2021). Qatar warns isolating Taliban could further destabilize Afghanistan. Reuters, [online]. Dalam: <https://www.reuters.com/world/middle-east/qatar-foreign-minister-says-taliban-should-cooperate-fight-terrorism-2021-08-31/> [Diakses 18 Oktober 2023].
- Kamrava, M. (2011). Mediation and Qatari Foreign Policy. *MIDDLE EAST JOURNAL*, [online] 65(4). Dalam: doi:10.3751/65.4.11 [Diakses 15 November 2023].
- Katzman, K. (2022). Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy. Congressional Research Service.
- Kusumawijaya, K., & Machmudi, Y. (2022). "Qatar Foreign Policy in Middle East Conflict Mediation. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, [online] 9(2). Dalam: doi:10.7454/meis.v9i2.149 [Diakses 18 Oktober 2023].

- Lederman, J., & Sanchez, R. (2021). From pariah to partner: How Qatar's role in Afghanistan helped to restore U.S. relations. NBC NEWS, [online]. Dalam: <https://www.nbcnews.com/news/world/pariah-partner-how-qatar-s-role-afghanistan-helped-restore-u-n> [Diakses 11 November 2023].
- Lia, B., & Aggestam, L. (2023). *Foreign Policy Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Mashal, M. (2018). Taliban Talks Covered Fate of U.S. Military Presence in Afghanistan, Envoy Says. The New York Times, [online]. Dalam: <https://www.nytimes.com/2018/12/20/world/asia/taliban-afghanistan-usa-military.html> [Diakses 15 November 2023].
- Milman, I. (2021). Qatar: Afghanistan's gateway to the West. [online]. Dalam: <https://en.unav.edu/web/global-affairs/catar-la-puerta-de-afganistan-para-occidente> [Diakses 18 Oktober 2023].
- Ministry of Foreign Affairs. (2022). Qatar Announces Additional USD 25 Million Pledge to Support Humanitarian Response in Afghanistan. [online]. Dalam: <https://mofa.gov.qa/en/qatar/latest-articles/latest-news/details/1443/08/28/qatar-announces-additional-usd-25-million-pledge-to-support-humanitarian-response-in-afghanistan> [Diakses 18 Oktober 2023].
- Mintz, A., & DeRouen Jr, K. (2018). The Rational Actor Model. *Understanding Foreign Policy Decision Making*, [online] 57-67. Dalam: [doi:https://doi.org/10.1017/CBO9780511757761.004](https://doi.org/10.1017/CBO9780511757761.004) [Diakses 5 September 2023].
- Mu'min, Yulianti, D., & Sulaeman, O. (2021). Islam Nusantara and Religious Peacemaking: Nahdlatul Ulama's Ideas in Creating Peace in Afganistan. *Walisongo: Jurnal Riset Sosial Keagamaan*, [online] 29(2), 181-210. Dalam: [doi:10.21580/ws.29.2.8945](https://doi.org/10.21580/ws.29.2.8945) [Diakses 11 November 2023].
- Naier, T. (2021). Qatar Soft Power: From Rising to the Crisis. *International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS)*, [online] 7(8), 43-50. Dalam: [doi:10.33642/ijbass.v7n8p6](https://doi.org/10.33642/ijbass.v7n8p6) [Diakses 22 Agustus 2023].
- NATO. (2022). NATO provides security support to Qatar for 2022 Football World Cup. [online]. Dalam: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_196994.htm?selectedLocale=en [Diakses 15 November 2023].
- Ola, T. P. (2021). United Nations' Provisions for Pacific Settlement of International Disputes. *Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales*, [online] 14(2).

- Dalam: <https://dj.univ-danubius.ro/index.php/AUDRI/article/view/1343> [Diakses 15 November 2023].
- Qazi, S. (2019). 'Peace deal is near': What we know so far about US-Taliban talks. Aljazeera. [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2019/8/13/peace-deal-is-near-what-we-know-so-far-about-us-taliban-talks> [Diakses 12 Oktober 2023].
- Qazi, S (2020). US, Taliban to sign deal aimed at bringing peace to Afganistan. Aljazeera. [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2020/2/29/us-taliban-to-sign-deal-aimed-at-bringing-peace-to-afganistan> [Diakses 12 November 2023].
- Regencia, T., Gadzo, M., & Uras, U. (2021). Kabul airport reopens to receive aid: Qatari envoy. Aljazeera. [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/4/us-seen-funding-afghan-humanitarian-aid-but-not-the-taliban> [Diakses 11 November 2023].
- Regencia, T., Pietromarchi, V., & Sidd, U. (2021). Qatar jet carrying technical team lands in Kabul: Live. Aljazeera. [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/1/biden-says-afghanistan-exit-marks-the-end-of-us-nation-building> [Diakses 12 Oktober 2023].
- Roberts, D. B. (2019). Reflecting On Qatar's "Islamist" Soft Power. [online]. Berkley Center. Dalam: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/04/FP_20190703_qatar_roberts.pdf [Diakses 10 Oktober 2023].
- Steinberg, G. (2023). Decision-making processes, baselines, and strategies. SWP Research Paper, [online]. Dalam: doi:10.18449/2023RP04 [Diakses 12 Oktober 2023].
- Tiwary, S. (2016). Understanding Taliban and the Peace Process. [online]. Dalam: https://www.researchgate.net/publication/303924565_Understanding_Taliban_and_the_Peace_Process [Diakses 15 November 2023].
- Wani, H. A. (2011). Understanding Conflict Resolution. International Journal of Humanities and Social Science, [online] 1(2). Dalam: <https://www.ijhssnet.com/journal/index/38> [Diakses 5 September 2023].
- Wivel, A. (2017). Realism in Foreign Policy Analysis. Oxford Research Encyclopedia of Politics, [online]. Dalam: doi:<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.01> [Diakses 22 Agustus 2023].

Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research: From Start to Finish*. New York: The Guilford Press.

Zweiri, M., & Al Qawasmi, F. (2021). *Contemporary Qatar Through the State and Society: An Introduction*. *Contemporary Qatar: Examining State and Society*, [online]. Dalam: doi:<https://doi.org/10.1007/978-981-16-1391-3> [Diakses 10 Oktober 2023].